

MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN PKH DI JAWA TENGAH

¹Iva Faulana, ²Indri Murniawaty, ³Rusdarti

^{1,2}Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi,
Universitas Negeri Semarang
E-mail: Indrimurniawaty@gmail.com

Abstract

Poverty is a major problem faced by all countries including Indonesia. One of the poverty alleviation programs in Indonesia is the Family of Hope Program (PKH). Central Java Province is one of the provinces that has a relatively high number of poor people among the provinces in Indonesia. The purpose of this study is to examine the success of the PKH Program in poverty alleviation efforts in Central Java. The purpose of this study is to describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation efforts through PKH policies in Central Java Province, starting from the education, health and social welfare components. The theory used in this study is the vicious circle theory of poverty. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques namely observation, interviews, and study documentation. The results of this study indicate that the Family Hope Program (PKH) in Wonosobo Regency, Central Java Province has succeeded in reducing poverty levels in addition to that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Wonosobo Regency has run quite well. But in reality there are still many Beneficiary Families (KPM) who depend on PKH assistance, given that such assistance is only temporary and is more focused on breaking the poverty chain.

Keywords: Poverty; Program Keluarga Harapan

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin dengan kategori cukup tinggi diantara provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keberhasilan Program PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan PKH di Provinsi Jawa Tengah, mulai dari komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lingkaran setan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan selain itu pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonosobo telah berjalan cukup baik. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bergantung pada bantuan PKH, mengingat bahwa bantuan tersebut hanya sementara dan lebih terfokus untuk memutus rantai kemiskinan.

Kata kunci : Kemiskinan; Program Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia, artinya kemiskinan merupakan masalah utama dan menjadi perhatian semua pihak

yang harus segera diatasi. Meskipun dalam permasalahan yang berbeda tidak satupun negara yang mampu mengatasi permasalahan kemiskinan. Semua negara termasuk Indonesia sepakat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menghambat kesejahteraan yang harus dan bisa diatasi dengan baik. kemiskinan menurut Asep Suryahadi (2016:2) merupakan kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, maupun akses informasi. Masalah kemiskinan juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat, Embun Suryani (2019:32).

Dampak negatif dari kemiskinan seringkali menimbulkan banyaknya permasalahan sosial, untuk itu bagi pemerintah kemiskinan juga dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi menyebabkan biaya pengeluaran dari pemerintah yang digunakan untuk proses pembangunan ekonomi juga menjadi lebih besar, seiring dengan tingginya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang didominasi oleh pulau Jawa menunjukkan bahwa program- program penanggulangan kemiskinan selama ini belum bisa mengatasi dan harus segera dievaluasi baik tingkat nasional maupun daerah.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin per-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2019 (ribu jiwa)

No	Provinsi	2018	2019
1.	DKI Jakarta	372.26	362.30
2.	Banten	668.74	641.42
3.	Jawa Barat	3.539.40	3.375.89
4.	Jawa Tengah	3.867.42	3.679.40
5.	Jawa Timur	4.292.15	4.056.00
6.	DI Yogyakarta	450.25	440.89

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2018-2019 jumlah kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 3.679,42 jiwa, menduduki urutan kedua setelah Jawa Timur dengan jumlah 4.056,00 jiwa. tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah membutuhkan sebuah kebijakan bersama dalam mengelola wilayah pemerintah provinsi dan pusat dengan berfokus pada kabupaten atau kota yang banyak memiliki jumlah penduduk miskin, sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah membuktikan bahwa masih banyak penduduk yang memiliki tingkat kesenjangan sosial yang tinggi. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah telah membuat pemerintah lebih memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan (Puspita 2015). Untuk memahami masalah kemiskinan di Jawa Tengah perlu memperhatikan lokalitas pada masing- masing daerah, diantaranya kriteria kemiskinan, pengumpulan data kemiskinan, penargetan, pemecahan masalah dan upaya pencegahan kemiskinan yang lebih objektif dan tepat sasaran (Rusdarti, 2013).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu temuan dari Sergei Soares (2007) dalam buku kerja International Poverty Centre menjelaskan bahwa program bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan antar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian program penanggulangan kemiskinan ini juga tidak diberikan secara percuma melainkan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Banyak daerah di Jawa Tengah yang menerima bantuan PKH, salah satunya yaitu Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ketertarikan peneliti dalam menentukan wilayah di Kabupaten Wonosobo karena Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang menyandang sebagai kabupaten termiskin selama lima tahun terakhir dari tahun 2013- 2018. Dalam penelitian ini Kecamatan Kertek,

Kabupaten Wonosobo merupakan tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penduduk di Kecamatan Kertek sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kebun dan buruh serabutan dan secara ekonomi masyarakatnya banyak yang kurang mampu, rendahnya pendidikan dan kurang memperhatikan kesehatan pada ibu hamil, menyusui dan balita.

Kemiskinan di Kecamatan Kertek perlu penanganan yang tepat, mengingat letak geografisnya yang terletak di lereng gunung dan masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu penanganan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kertek membutuhkan suatu program dari pemerintah yang tepat sasaran. Sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dijalankan pada tahun 2015 di Kabupaten Wonosobo guna untuk merespon permasalahan kemiskinan, khususnya di Kecamatan Kertek. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat membantu masyarakat miskin yang nantinya dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka terutama untuk meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sehingga dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga miskin di Kecamatan Kertek. Dengan demikian proses penanggulangan kemiskinan melalui PKH bukanlah hal yang mudah, tetapi membutuhkan pendekatan-pendekatan mulai dari pendataan hingga pemutakhiran peserta, agar dianggap benar-benar miskin dan layak menerima bantuan tersebut. Belajar pada tahun sebelumnya bahwa program penanggulangan kemiskinan, dalam kenyataannya sering menjumpai kondisi yang dirasa kurang membuahkan hasil dan kurang menguntungkan karena penanggulangannya yang kurang optimal dan seharusnya program tersebut dapat meningkatkan kualitas manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, agar dapat keluar dari jeratan lingkaran setan kemiskinan.

Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 kecamatan yang terbagi yang didalamnya terdapat 29 kelurahan, dan 236 desa. Pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo terletak di Kecamatan Wonosobo, adapun kecamatan di Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut: Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kejajar, Kepil, Leksono, Sapuran, Kertek, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Mojotengah dan Wonosobo. Dengan masing-masing bantuan sebagai berikut:

Tabel 2
Data Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Wonosobo
tahun 2019

No	Nama	Jumlah Penduduk Miskin	Peserta PKH
1	Garung	4.149	4.026
2	Kalibawang	1.371	1.377
3	Kalikajar	4.483	4.333
4	Kaliwiro	1.990	1.977
5	Kejajar	3.690	3.573
6	Kepil	4.892	4.659
7	Kertek	5.617	5.452
8	Leksono	1.661	1.582
9	Mojotengah	3.773	3.539
10	Sapuran	3.765	3.465
11	Selomerto	1.941	1.821
12	Sukoharjo	1.307	1.297
13	Wadaslintang	3.284	3.352
14	Watumalang	3.204	3.156
15	Wonosobo	2.673	2.583
	Total	46.132	47.800

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo 2019

Berdasarkan tabel 2, jumlah penduduk miskin paling banyak di Kabupaten Wonosobo adalah Kecamatan Kertek dengan jumlah 5.617 jiwa, dan paling banyak penduduk yang menerima bantuan Prgram Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebesar 5.452 jiwa. Dengan kualitas pendidikan yang masih rendah, kesehatan yang masih rendah serta kesejahteraan yang menurun. Dalam pengelolaan dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih banyak masyarakat di Kecamatan Kertek yang belum mengelola bantuan dengan sebagaimana mestinya. Indikator permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dapat tersajikan. Namun dari permasalahan tersebut peneliti menganggap sudah cukup alasan untuk melakukan penelitian terhadap fenomena kemiskinan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini Program Keluarga harapan (PKH) dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial berupaya terus memotivasi Rumah Tangga Miskin (RTM) agar terus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program PKH di Kecamatan Kertek dinilai sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian hal tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan. Salah satunya yaitu mengenai kelayakan dan kevalidan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertek, selain itu adanya koordinasi dari pihak yang terkait agar pelaksanaannya dapat menjaring kelompok sasaran yang tepat dan berjalan sesuai dengan rencana.

LANDASAN TEORI

Melihat dari sudut pandang spasial dan sektoral menurut Yulianto Kadji (2012) kemiskinan selalu dikaitkan dengan pedesaan, pertanian, sektor informal, dan status pekerjaan kelompok miskin. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di pedesaan dengan orientasi pembangunan yang bias pada daerah perkotaan, usaha yang bersifat fomal dan komersial, serta fokus pada pulau jawa dinilai semakin mempersulit upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sejalan dengan Bappenas (2018), karakteristik miskin salah satunya adalah melihat kondisi geografis, yang tingkat kemiskinan tertinggi umumnya berada di wilayah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan cenderung memiliki pendapatan dan daya konsumsi yang rendah, menderita kekurangan gizi, buta huruf, tinggi resiko terhadap kematian bayi, dan standar perumahan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Namun pada prinsipnya kemiskinan tersebut dapat menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau dilihat secara rinci dapat menggambarkan kondisi yang tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri, seperti pangan, papan, dan sandang. Salah satunya yaitu definisi kemiskinan menurut BPS, yang menjelaskan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2019).

Kemiskinan Ragnar Nurkse atau dikenal sebagai teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan keadaan dimana suatu negara akan tetap mengalami kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam mencapai pembangunan yang lebih baik (Nurdiansyah, 2016).

Upaya untuk menanggulangi kemsikinan pemerintah telah mengeuarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaanya terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah mengklasifikasikan dalam tiga kelompok klaster, diantaranya yaitu:

1. Program- Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1

Program- program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1 (satu) merupakan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Adapun Program- program dari Klaster 1

diantaranya: a) Program Keluarga Harapan (PKH); b) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); c) Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS); d) Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN); e) Bantuan Siswa Miskin (BSM)

2. Program- Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II

Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsipnya. Program ini digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan, yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Adapun jenis program pada Klaster II berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif.

3. Program- Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III

Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan modal atau pinjaman dalam skala mikro. Program pada Klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Dari beberapa program penanggulangan kemiskinan diatas, salah satu program yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada pada Klaster I.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program tersebut merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan misalnya bagi anak usia sekolah yaitu Fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK), ataupun kehadiran di Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) misalnya bagi anak balita atau ibu hamil, selain itu manfaat PKH juga untuk membantu penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti materi penelitian, data dari BPS, BAPPEDA, UPPKH Kabupaten Wonosobo. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan observasi penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat alamiah sesuai dengan pendapat Moleong (2016) ciri- ciri penelitian kualitatif adalah: (1) latar alamiah; (2) manusia sebagai instrumen; (3) menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, pengamatan, penelaahan dokumen; (4) analisis secara induktif; (5) adanya fokus penelitian, dll.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang berlokasi di Jl Parakan No. 162 Kertek Wonosobo, yang dilaksanakan mulai bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah informan pengurus Program Keluarga Harapan yaitu PKH di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Unit Pelaksanaan Program keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Wonosobo, Staf bagian perencanaan di BAPPEDA Kabupaten Wonosobo, Sekretaris Kecamatan Kertek, Pendamping

PKH di Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo, dan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Kertek.

Penelitian ini diperoleh dengan sumber data sebagai berikut: (a) data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung, dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melalui wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam peneltiann ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai SKPD di Kecamatan Kertek; (b) data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh untuk melihat gambaran umum Implementasi PKH di Kecamatan Kertek melalui profil lembaga, buku referensi, artikel ilmiah dan pedoman PKH 2019. Data sekunder ini diperoleh dengan metode observasi yaitu dengan mengamati langsung dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan dokumentasi yaitu berupa data PKH.

Guna memperoleh data dilapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) observasi, jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke kantor SKPD untuk mengamati pelaksanaan implementasi PKH di Kecamatan Kertek; (b) wawancara, wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada petugas DKPD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kertek; (c) dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menganalisa dokumen-dokumen terkait implementasi PKH di Kecamatan Kertek.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahap diantaranya yaitu: (a) reduksi data, pada tahapan ini peneliti memilah dan memilih data PKH yang relevan. Data yang diperoleh dari UPPKH Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo seagai bahan mentah dan diolah kembali dengan memfokuskan kemiskinan dan kehidupan pada KPM di Kecamatan Kertek; (b) penyajian data, dalam tahapan ini penyajian data dalam bentuk tema-tema singkat yang langsung diikuti dengan analisis setiap tema sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan dari setiap informan PKH; (c) menarik kesimpulan, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan melakukan penafsiran dan menganalisis secara kritis mengenai kemiskinan dan implementasi PKH, hambatan dan solusi dalam kemiskinan kemudian ditarik kesimpulan hingga mencapai tujuan yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian Profil Kecamatan Kertek



Gambar 1 Peta Kabupaten Wonosobo 2018

Kecamatan Kertek merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Wonosobo yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Kertek juga merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Wonosobo yang memiliki daerah pegunungan. Terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Wonosobo, dengan jarak 9 km dari jalan jalur Kabuapten Temanggung, yang

memiliki luas daerah 62,14 Km² atau 6,31% dari luas Kabupaten Wonosobo. Secara geografis, Kecamatan Kertek terletak pada 7^o18'40"- 7^o24'40" lintang selatan (LS) dan 109^o93'30"- 110^o02'35" bujur timur (BT). Kecamatan Kertek berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung di sebelah utara, di sebelah timur dengan Kecamatan Kalikajar, di sebelah selatan dengan Kecamatan Selomerto, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo. Secara administratif, Kecamatan Kertek terdiri dari 19 desa dan 2 kelurahan yang terdiri dari Desa Sindupaten, Surengede, Bojasari, Kertek, Sumberdalem, Purwojati, Karangluhur, Ngadikusuman, Wringinanom, Sudungdewo, Bejiarum, Damarkasih, Banjar, Tlogodalem, Pagerejo, Candimulyo, Purbosono, Candiyasan, Kapencar, dan Reco. Dengan desa terluas adalah Desa Candiyasan dan yang terkecil adalah Desa Banjar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Pembagian Wilayah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo

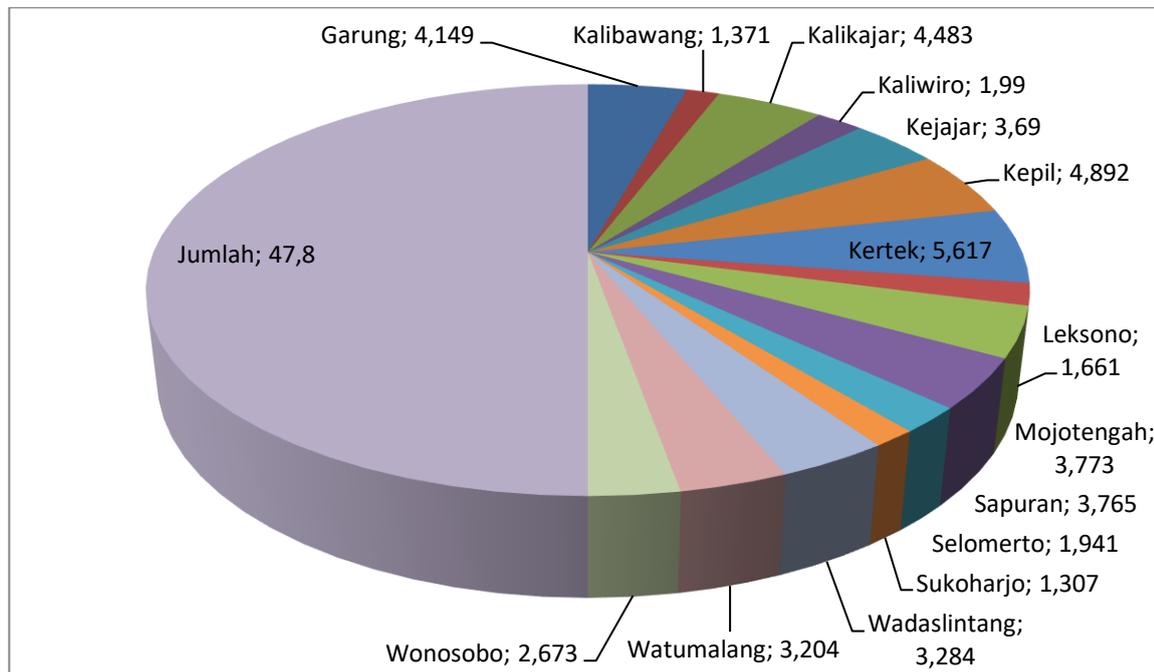
No	Desa	Luas (Km ²)	Presen-tase (%)	Jumlah Penduduk
1	Sindupaten	1,63	2,62	3.860
2	Surengede	1,60	2,58	3.836
3	Bojasari	1,75	2,82	3.774
4	Kertek	2,10	3,38	8.048
5	Sumberdalem	1,05	1,69	4.151
6	Purwojati	1,66	2,67	4.369
7	Karangluhur	2,19	3,52	6.237
8	Ngadikusuman	1,79	2,88	3.248
9	Wringinanom	1,20	1,93	2.595
10	Sudungdewo	1,71	2,75	3.662
11	Bejiarum	1,58	2,54	3.652
12	Damarkasih	5,64	9,08	3.183
13	Banjar	0,97	1,56	1.663
14	Tlogodalem	1,44	2,32	2.287
15	Tlogomulyo	4,38	7,05	1.859
16	Pagerejo	5,36	8,63	5.539
17	Candimulyo	4,13	6,63	6.795
18	Purbosono	1,62	2,61	3.033
19	Candiyasan	8,09	13,02	4.506
20	Kapencar	6,33	10,19	5.735
21	Reco	5,91	9,51	7.756
	Jumlah	62,13	100	90.254

Sumber: Proyeksi penduduk menurut desa di Kecamatan Kertek tahun 2020

Kemiskinan di Kecamatan Kertek

Penelitian ini membuktikan bahwa permasalahan kemiskinan saat ini masih belum bisa di atasi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk miskin cukup banyak adalah Provinsi Jawa Tengah dengan 35 Kabupaten/Kota. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Kabupaten Wonosobo merupakan Kabupaten yang masuk kedalam 2 besar zona keparahan kemiskinan setelah Kabupaten Kebumen. Kemiskinan tersebut juga tersebar di seluruh kecamatan atau kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Namun, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan

Kertek.



Sumber : Rekapitulasi Graduasi KPM Tahun 2019
Kab. Wonosobo

Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo tahun 2019

Dari Gambar 1. dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kertek merupakan Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduk miskin, yaitu mencapai 5.617 jiwa. Kemiskinan di Kecamatan Kertek menjadi sorotan bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk itu salah satu langkah untuk menanggulangi kemiskinan di kecamatan tersebut yaitu dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan pendapat Chambers (1996) dalam penelitian Slamet Agus (2013) bahwa kemiskinan yang dialami oleh suatu rumah tangga sama dengan roda penggerak yang mundur dengan cepat yang sulit bahkan tidak mungkin untuk kembali dengan cepat sehingga rumah tangga miskin akan tetap miskin. Jika dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan melalui PKH di Kecamatan Kertek sebagai udaha untuk merubah pada kondisi yang lebih baik untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan. Masyarakat miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di Kecamatan Kertek lebih mengutamakan bantuan yang bersifat individu yang memperhatikan kondisi rill masyarakat miskin, bukan kondisi umum, masyarakat miskin membutuhkan kesejahteraan dalam rumah tangga, membutuhkan pendidikan bagi anak- anak, membutuhkan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan seperti itulah yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Kertek, ketidakberdayaan dalam melawan kemiskinan yang harus diperhatikan dan dibantu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusdarti & Lesta Karolina (2013) kemiskinan disebabkan karena keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksetaraan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan.

Profil Keluarga PKH di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga yang menerima bantuan sosial bersyarat yang masuk kedalam data penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil

dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH digunakan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Kehidupan KPM di Kecamatan Kertek didominasi oleh permukiman yang padat penduduk. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani yang setiap harinya harus bekerja. Upah dari hasil pekerjaan tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu banyak keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Dampak dari perekonomian tersebut mengakibatkan angka partisipasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di Kecamatan Kertek rendah. Selain itu letak geografis Kecamatan Kertek yang terdapat di lereng Gunung mengakibatkan keterbatasan akses untuk memenuhi ketiga komponen dalam PKH.

Kepadatan penduduk menimbulkan banyaknya rumah yang tidak layak huni seperti: ukuran rumah yang kecil dan sempit yang dihuni oleh dua kepala keluarga, selain itu masih banyak KPM yang tidak memiliki saluran pembuangan akhir manusia, sehingga sanitasi di Kecamatan Kertek rendah. Rata-rata KPM di Kecamatan Kertek banyak didominasi oleh bantuan komponen pendidikan, karena pendidikan di Kecamatan Kertek rendah.

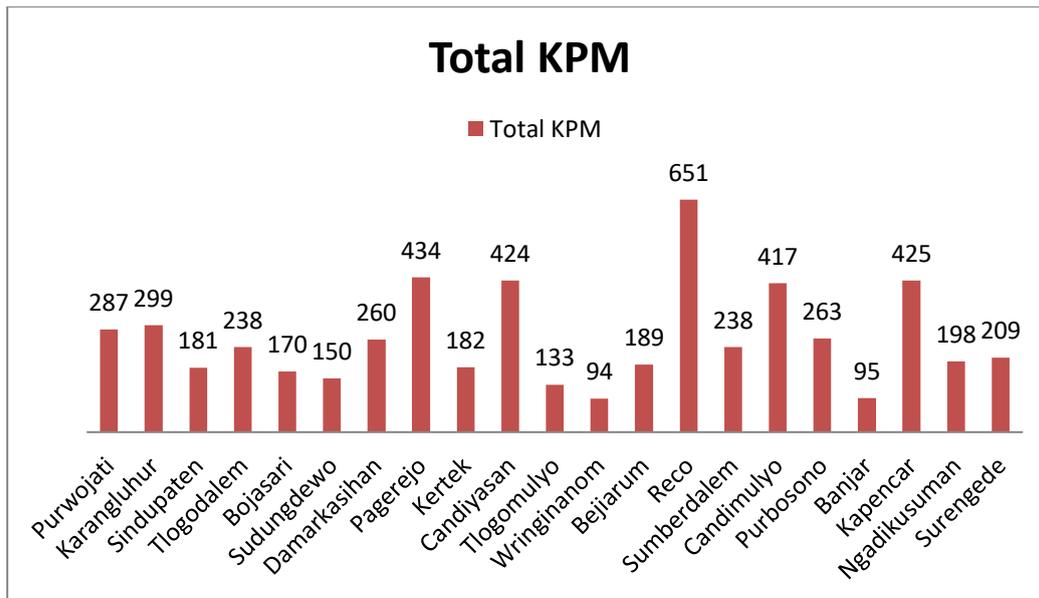
Kehidupan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Kertek hingga saat ini masih terkendala dengan belum adanya saluran sanitasi yang baik. Selama ini masyarakat di Kecamatan Kertek banyak yang tidak memiliki kamar mandi sendiri untuk menunjang kebutuhan dasar hidupnya. Setiap harinya harus menumpang di kamar mandi milik bersama, hal tersebut biasanya terjadi pada keluarga yang tergolong miskin.

Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai buruh pemecah batu di lereng Gunung Sindoro dengan pendapatan yang tidak lebih dari Rp500.000 perbulan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak bisa membangun kamar mandi atau setidaknya jamban sederhana. Hidup serba kekurangan tanpa adanya jamban dan menumpang mandi di WC milik orang lain ini sudah biasa dirasakan pada masyarakat Kertek. Untuk memenuhi kebutuhan MCK, masyarakat yang tidak mempunyai kamar mandi harus menuju ke mata air yang jaraknya sekitar 1 km dari tempat tinggal mereka dan berbagi bersama masyarakat lainnya.

Implementasi Bantuan Bersyarat Bagi Keluarga Pkh

Berdasarkan hasil temuan menurut Muhammad Arif (2018), bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015- 2017 belum sepenuhnya teratasi, dikarenakan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang banyak, belum sebanding dengan jumlah pendamping yang tersedia sehingga masih terjadi *overload*. Namun menurut temuan hasil pengamatan dan wawancara peneliti, di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo perlahan mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa segala bentuk program pemerintah berjalan secara maksimal termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Dengan berkaca melalui konsep pemberdayaan dalam membangun masyarakat (*community development*), dapat memperbaiki kualitas kehidupan serta mengembangkan segala kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah satu program sosial yang sedang dijalankan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), yang sekarang mengalami perubahan pada tahun 2019 menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai imbalannya Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan berupa uang tunai.



Sumber: Data alokasi penerimaan KPM Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2019

Gambar 2 Jumlah penerima KPM per-Desa Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo September 2019

Gambar 2. dapat dijelaskan bahwa total Rumah Tangga (RUTA) yang mendapatkan bantuan PKH di Kecamatan Kertek yaitu 5.452 jiwa, merupakan kecamatan yang paling banyak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal sebelumnya pada tahap ke tiga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertek sebesar 5.357 jiwa. Hal itu merupakan penambahan KPM pada tahun yang sama yaitu tahun 2019 (Dinsos Provinsi Jawa Tengah 2019).

Implementasi program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, memfokuskan pada masyarakat miskin yang harus menerima program-program bantuan dari pemerintah. Dimana masyarakat telah benar-benar dalam keadaan tidak mampu dan harus menerima bantuan, menurut teori pendekatan sumber daya dan hak yang dikemukakan oleh Armantya Sen (1981: 19). Teori tersebut membahas kemiskinan yang disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu, dalam konsep ini dapat dijelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang dalam bekerja. tetapi juga berkaitan dengan hak-hak yang terlindungi, serta hilangnya kesempatan untuk mendapatkan harga yang layak untuk produk yang dihasilkan atau tenaga yang diberikan. Selain itu hilangnya kesempatan untuk memperoleh bantuan, subsidi, dan program-program dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian secara teknis dari proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertek sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya di lapangan masih belum maksimal dikarenakan banyak masyarakat miskin yang masih belum menerima PKH akibat data yang kurang eligible. Sehingga implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertek dapat dikatakan masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Karena pada saat proses penyaluran sebagian besar aparat desa belum sepenuhnya melaksanakan pendataan terhadap pelaksanaan program.

Hal tersebut senada dengan temuan Shella Yulia Rosalina (2018) yang menganggap bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan seperti yang diharapkan dengan melihat masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) secara maksimal, karena keterbatasan pendamping dalam mendata masyarakat miskin. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak Agnes P, Rusdarti, dan Prasetyo P (2019) menggap bahwa implementasi PKH

belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan kelayakan program keluarga harapan yang dianggap tidak termasuk keluarga miskin, sementara pada saat yang sama terdapat orang yang dianggap orang miskin yang telah dieliminasi sebagai peserta dalam program keluarga harapan. Hal ini dikarenakan kesejahteraan di Kabupaten Brebes sangat rendah.

Kendala dalam Pemberian Bantuan Bersyarat di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo

Kendala dalam pemberian bantuan PKH di Kecamatan Kertek salah satunya yaitu kurang mengertinya rumah tangga sangat miskin terhadap sanksi yang diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta PKH. hal ini karena pada saat pengumpulan data persyaratan bantuan PKH masih banyak yang mengalami keterlamatan. Berdasarkan hasil temuan menurut Muhammad Arif (2018), bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015- 2017 belum sepenuhnya teratasi, dikarenakan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sebanding dengan jumlah pendamping yang tersedia sehingga masih terjadi *overload*.

Kendala lain dalam pelaksanaan program ini adalah adanya data yang tidak benar yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku menjadi orang miskin untuk mendapatkan dana PKH tersebut. Selain itu bentuk tanggung jawab dari pemerintah yang kurang ikut andil dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo khususnya di Kecamatan Kertek. Disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan Kertek mengenai sikap dan tugas aparatur Dinas Sosial, pendamping PKH dan Peserta PKH secara umum sudah baik, hanya saja ada beberapa peserta PKH yang kurang bekerjasama dan bertanggungjawab.

Kendala selanjutnya yaitu permasalahan pendampingan dilihat dari jumlah dan data klien, pada program PKH di Kecamatan Kertek seorang pendamping harus mendampingi satu desa satu pendamping, hal itu dirasa kurang efektif karena terdapat jumlah penduduk yang melebihi batas dengan didampingi oleh satu orang pendamping saja. Kurangnya jumlah pendamping juga menjadi kendala yang cukup penting, karena untuk menghadapi jumlah KPM yang masih banyak. Apalagi dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi desa yang tidak sama.

Secara umum, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Kertek lebih bersifat teknis. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya yaitu dalam proses graduasi, masih banyak KPM yang enggan untuk keluar secara sukarela. Para KPM masih sulit diarahkan keluar padahal dari segi kebutuhan dan ekonomi sudah layak di proses graduasi mandiri. Adanya graduasi mandiri KPM merupakan tolok ukur keberhasilan proses pendampingan dan terciptanya tujuan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kurangnya motivasi yang dimiliki oleh KPM juga merupakan kendala bahwa bantuan tersebut hanya bersifat sementara

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih belum bisa diatasi, meskipun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan. Tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi, namun juga melalui penguatan sosial. Program PKH di Kabupaten Wonosobo mulai digalakkan pada tahun 2015, hingga pada tahun 2019 total KPM sebesar 5.050 KK. Dalam hal ini program PKH sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mempengaruhi pola konsumsi ke arah yang lebih baik. Selain itu bantuan tersebut mampu merespon kemiskinan terhadap kekurangan kebutuhan konsumsi, kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun terdapat variasi dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut.

Adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan Program PKH di Kabupaten Wonosobo khususnya di Kecamatan Kertek KPM PKH memiliki motivasi dalam memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan tidak terlepas

dari peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga memudahkan KPM memenuhi kewajibannya. Adapun kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bahwa sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpenghasilan rendah sehingga masih banyak ditemukan pemanfaatan dan bantuan sosial yang kurang sesuai dengan tujuan, pokok, dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Kondisi wilayah yang bera di pegunungan menyebabkan sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu rendahnya motivasi dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk berfikir lebih maju hingga saat ini masih bergantung pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersifat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisanjaya, S. (2016). *Program Keluarga harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan pengentasan Kemiskinan*. Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 4 No. 1 Hal. 1-140.
- Amartya Sen. (1981). *Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan*. Bandung. Penerbit Mizan.
- Aan Komariah, Djam'an Satori. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Bakhtiar, Ahmad. (2015). *Implementasi Program Keluarga harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 2. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Blanden, J. and Gibbons, S. (2006). *The Persistence of Poverty Across Generations a View from two British Cohorts*. Bristol: The Policy Press.
- Bangun, Deylia C. (2016). *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Paradigma, Volume 04 Nomor 01. Universitas Negeri Surabaya.
- Bank, W. (2007). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: The World Bank Office Jakarta.
- Bowles, Samuel. (2006). *Povert Traps*. America
- BPS. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2018*. Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo.
- Cahyono, S. A. (2018). *The Action Step Of Expected Family Program: The Contribution of Expected family Program to the Welfare Improvement of Beneficiary Family*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial , 1-3.
- Chambers, Robert. (1996). *PRA (Participatory Rular Appraisal), Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kansius: Yogyakarta.
- Hendratno. (2010) *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Cakupan Imunisasi, Pemeriksaan Kehamilan, Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Konsumsi Rumah Tangga*. Tesis Online. [Http://lib.ui.ac.id/file%3File%3Ddigital/203333967-T%232032763-Hendratno.pdf&sa=U&ved=0CasQfjAAahUKEwiu4sa6zKzIAhXJLYgKHWDwAPE&usg=](http://lib.ui.ac.id/file%3File%3Ddigital/203333967-T%232032763-Hendratno.pdf&sa=U&ved=0CasQfjAAahUKEwiu4sa6zKzIAhXJLYgKHWDwAPE&usg=)

AFJCNHfXd7.

[https://amp.kompas.com/regional/read/2017/11/01/19292001/naik-87-persen-ump-jawa-tengah-2018-menjadi-rp-1486065.](https://amp.kompas.com/regional/read/2017/11/01/19292001/naik-87-persen-ump-jawa-tengah-2018-menjadi-rp-1486065)

[https://www.bappenas.go.id/files/6915/6082/6584/Analisis_Wilayah_dengan_kemiskinan_Tinggi_-_BAPPENAS.pdf.](https://www.bappenas.go.id/files/6915/6082/6584/Analisis_Wilayah_dengan_kemiskinan_Tinggi_-_BAPPENAS.pdf)

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132304482/pendidikan/PEMIKIRAN+PENDIDIKAN+PAULO+FREIRE.pdf>

Keluarga, D. J. (2019). *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

Michael P. Todaro, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurdiansyah. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Karisidenan Besuki dan Lumajang Tahun 2008-2013*. UNEJ PRESS.

Nurkse, Ragnar. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford: Oxford University Press.

Simanjuntak, Agnes P., Rusdarti dan P. Eko Prasetyo (2019). *The Implementation of Hope Family Program (PKH) in Poverty Prevention Effort in Kluwut Village Bulukumba District Brebes Regency*. Journal of Economic Education, 12-21.

Statistik, B. R. (2018). *Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2018*. BPS Provinsi Jawa Tengah 2018.

Rusdarti, R., & Sebayang, L. K. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Economia, 9(1), 1-9.